

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dalam perkembangan sektor publik dewasa ini, tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah sangat kuat. Akuntabilitas publik dapat dicapai salah satunya dengan keterandalan laporan keuangan (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik maka penerapan Permendagri No 13 tahun 2006 maupun PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan telah dijalankan oleh sebagian besar pemerintah daerah. Untuk menyempurnakan sistem penyusunan laporan keuangan dengan mekanisme akuntansi yang ditetapkan dari dua aturan tersebut, maka pemerintah daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan PP No 71 tahun 2010 (Marviandi, 2014).

Akan tetapi dengan diterbitkannya Permendagri No 64 Tahun 2013, yang mensyaratkan untuk menyusun kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) maksimal pada bulan Mei 2014 dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015 memaksa pemerintah daerah untuk segera menerapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Berdasarkan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan akuntansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan kepala daerah paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan penerapan SAP Berbasis AkruaI paling lambat mulai tahun anggaran 2015 (Marviandi, 2014).

Untuk menerapkan peraturan pemerintah tersebut, maka salah satu kendala terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia yang tidak banyak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang menyebabkan kesulitan di dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, banyak di daerah yang belum menggunakan fasilitas teknologi informasi serta masih rendahnya kualitas pengendalian intern akuntansi. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada keterandalan dari laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Keterandalan pelaporan keuangan merupakan nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, permasalahan yang muncul terkait keterandalan tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan sebagainya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dalam bidang akuntansi dapat menghasikan laporan keuangan yang andal, sedangkan pemerintah daerah yang tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghambat

pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan menghasilkan kualitas informasi akuntansi yang buruk.

Untuk pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil. Pemanfaatan teknologi juga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. Untuk pengendalian intern dapat mengurangi adanya penyimpangan dan kecurangan di dalam laporan keuangan. Temuan empiris dari penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern.

Penelitian ini difokuskan untuk mempelajari keterandalan laporan keuangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi. Topik penelitian ini pernah diteliti oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Hullah, Pangemanan, Tangkuman, dan Budiarmo (2012), Celviana dan Rahmawati (2010), Wiwik (2010), Saleh, Saerang, dan Ventje (2013) hasilnya membuktikan bahwa: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), objeknya adalah Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini diberi judul: **Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi?
3. Apakah sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan (kontribusi teori)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dukungan terhadap faktor pembentuk keterandalan laporan keuangan, di antaranya: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi pada instansi publik.

2. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

3. Bagi pengelola keuangan dan akuntansi

Diharapkan penelitian memberikan pengetahuan tentang dampak kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan

pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Untuk itu perlu adanya peningkatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.

4. Bagi SKPD di Kabupaten (khususnya di Kabupaten Ngawi)

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi SKPD-SKPD khususnya di Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, sehingga dapat menghindari adanya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Sistematika penyusunan laporan skripsi terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5, dengan uraian sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari: telaah teori dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.
- BAB III** Metode penelitian, antara lain: desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV Analisis data dan pembahasan yang terdiri dari: data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V Simpulan dan saran yang terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penulisan skripsi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hanafi (2003), laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, *timing* aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- c. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventarisasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- d. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikemukakan bahwa ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yakni:

- a. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
- b. Nilai historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- c. Realisasi (*realization*). Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu.
- d. Substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*). Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- e. Periodisitas (*periodicity*). Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya akan dimilikinya dapat ditentukan.
- f. Konsistensi (*consistency*). Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
- g. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

h. Penyajian wajar (*fair presentation*). Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan diterapkannya delapan prinsip yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka akan terwujud akuntabilitas dan *good governance* pada instansi pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). *Vertical accountability* adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. *Horizontal accountability* adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tuntunan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horisontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal (Muindro dalam Sukma, 2013).

Akuntabilitas instansi publik akan terwujud dengan baik apabila instansi publik mampu menerapkan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara

bertanggung jawab dan akuntabel. Akuntabilitas publik akan berdampak pada tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Arti *good* dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung pemahaman, sebagai berikut:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.
- c. Pemerintahan (*governance*) lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009).

Good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan mewujudkan akuntabilitas dan *good governance* melalui keterandalan pelaporan keuangan pemerintah serta akan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya: kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan faktor-faktor lainnya.

2. Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Menurut FASB dalam *Statement Offinancial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan

keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keterandalan dapat ditinjau dari kelengkapan, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah (IAI, 2012).

Laporan keuangan bersifat andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Werther dan Davis (1996) dalam Sutrisno (2009), sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi. Tujuan organisasi agar dapat tercapai dengan baik, dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria organisasi (Sofyandi, 2008).

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008) untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Matindas (2002), kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya. Danim (2004), kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan).

Berbicara kualitas SDM tidak terlepas dari kompetensi, kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu

pekerjaan (Hevesi, dalam Indriasari dan Nahartyo (2008)). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Dunnetts (2004) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008), *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Menurut O'Brien (2007), teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis teknologi informasi yang mengelola komponen-komponennya berupa *hardware*, *software*, *netware*, *dataware*, dan *brainware* untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Komponen teknologi informasi terdiri dari komputer *hardware*, *software*, dan teknologi komunikasi yang digunakan oleh personel.

a. Hardware

Menurut O'Brien (2007), *hardware* mencakup semua peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. *Hardware* berkaitan dengan peralatan keras dengan media komunikasi yang menghubungkan beberapa jaringan dan memproses paket data sehingga transmisi data lebih efektif.

b. Software

Menurut O'Brien (2007), *software* meliputi semua rangkaian perintah pemrosesan informasi. Konsep umum software ini tidak hanya rangkaian perintah informasi yang disebut program dengan hardware komputer

pengendalian dan langsung, tapi juga rangkaian perintah pemrosesan informasi yang disebut prosedur yang dibutuhkan orang-orang.

c. Jaringan Komputer

Menurut Sopandi (2008), jaringan komputer adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Gabungan teknologi ini menghasilkan pengolahan data yang dapat didistribusikan, mencakup database, *software* aplikasi dan *hardware* secara bersamaan. Secara geografis jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa macam, sebagai berikut: *local area network* (LAN), *metropolitan area network* (MAN), dan *wide area network* (WAN).

d. Internet, Intranet, Ekstranet

Menurut Sopandi (2008), internet adalah jaringan komputer yang tumbuh cepat dan terdiri dari jutaan jaringan, perusahaan, pendidikan, serta pemerintah yang menghubungkan ratusan juta komputer, serta pemakaian lebih dari dua ratus negara. Intranet adalah jaringan dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet (seperti server, dan browser web, protokol jaringan, TCP/IP, database publikasi dokumen Hipermedia HTML, dan lain-lain) untuk menyediakan lingkungan yang mirip dengan internet di dalam perusahaan untuk memungkinkan saling berbagai informasi, komunikasi, kerjasama, dan dukungan bagi proses bisnis. Dan ekstranet adalah hubungan jaringan yang menggunakan teknologi intranet untuk saling menghubungkan intranet pelanggannya, supplier dan mitra bisnis lainnya.

5. Pengendalian Intern Akuntansi

Menurut Mulyadi, (2008), pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari struktur pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Menurut Siti dan Ely (2010), pengendalian intern akuntansi adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam

ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) ada lima unsur (komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini:

- a. Lingkungan pengendalian. Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian inter, menyediakan disiplin dan struktur.
- b. Penaksiran risiko. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan unuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
- c. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- d. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
- e. Pemantauan. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

6. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan